

Merenung Pembangunan

Punjung Tulis

70 tahun Liek Wilardjo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (5 milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Penyunting:

Kutut Suwondo

David S. Widihandoyo

Ferry R. Karwur

Marthen Ndoen

Petrus Handoko

Soegeng Hardiyanto

Penerbit

Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan

Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

Merengut Pembangunan

Punjung Tulis

70 Tahun Liek Wilardjo

Cetakan I, November 2009

Penyunting:

Klutut Suwondo

David S. Widihandoyo

Ferry B. Karwur

Marthen Ndoen

Petrus Handoko

Soegeng Hardiyanto

Penata Letak:

Jerry R. Langkun

Ilustrasi Sampul:

Jerry R. Langkun

Desain Sampul:

Yisar Andrianus

Merengut Pembangunan: Punjung Tulis 70 Tahun Liek Wilardjo

Salatiga: FT Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW

xiv + 460 hal.; 15 cm x 23 cm

ISSN: 978-979-1098-13-8

Daftar Isi

Kata Pengantar	ix
1. Tentang dan Dari Predikan Salatiga: Liek Wilardjo Bambang Hidayat	1
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Ditinjau Dari Filsafat dan Etika Paulus Harsono	5
3. Negara Perlu Menetapkan Ideologinya Sutarno	29
4. The Dance of Change and The Dancing Leader Jusuf Sutanto	47
5. Mistik, Agama dan Perubahan Paradigma Sains: Sebuah Tinjauan Teologis Kristen Emanuel Gerrit Singgih	63
6. Why was there no Javanese Galileo? Geert Arend (Gerry) van Klinken	79
7. "Hukum Moral dalam Sanubariku" Sebuah Tuturan Ulang Etika Kewajiban Kategoris Soegeng Hardiyanto	105
8. Membangun Indonesia Berdasarkan Etika Kehidupan C. B. Kusmaryanto	121

9. Perjalanan Panjang Menuju Kematian? Ferry F. Karwur	145	22. Kemampuan Menulis Ilmuwan Indonesia: Sebuah Cermin Kegagalan Produk Pendidikan yang Memerhatikan Mien A. Rifai	339
10. Catholic Perspective: Building a Sense of World Community With More Justice, Peace, and Integrity of Creation Paulus Wiryono P.	157	23. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) R. K. Sembiring	363
11. Peran Pendekar Bahasa Dalam Pembinaan Bahasa Indonesia Harimurti Kridalaksana	169	24. Manusia dan Pembangunan Nico L. Kana	373
12. Pemer kaya Kosa Kata Indonesia St. Sularto	175	25. Alam, Manusia dan Pembangunan Dad Murniah	381
13. Aspek Linguistik Budaya dalam Terjemahan Alkitab Anton M. Moeliono	183	26. Civil Society Di Tengah Agama-Agama Kutut Suwondo	393
14. Tata Bunyi Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Hasan Alwi	197	27. <i>Plural Social Capital</i> sebagai Sumberdaya Pembangunan Indonesia Tonny D. Pariela	409
15. Di Tengah Gelombang Perubahan Bahasa Ariel Heryanto	235	28. Kapitalisme, Demokrasi dan Pembangunan di Indonesia David Widiandojo	421
16. <i>Sebuah bingkisan ulang tahun ke 70 bagi Profesor Liek Wilardjo:</i> Teknologi, Fisika dan Perkembangan Umat Manusia Jan Hoesda	255	29. "Liek Wilardjo Itu Memang Manusia Setengah Dewa" Punjungan Kecil Seorang Mantan Murid Yuliman Purwanto	437
17. <i>Worldview</i> dan Ancaman Keberlanjutan Sumberdaya Air Budi Widianarko	275	30. Perjalanan Hidup Liek Wilardjo Ny. Pangestuti Lidia Laban	443
18. Inovasi Demi Kehidupan Berkelanjutan yang Menguntungkan Liem Ferryanto	291	Tentang Penulis	447
19. Mikroprosesor Masa Depan dan Perubahan Gaya Hidup Akibatnya Petrus Handoko	299	Indeks	453
20. Antara Nalar dan Kebiasaan: Membaca Pak Liek Sebagai Teks Pendidikan Anton Saptono	309		
21. Demam Internasionalisasi Pada Perguruan Tinggi Masa Kini "It is a battle for brain-power" Willi Toisuta	327		

Di Tengah Gelombang Perubahan Bahasa

Ariel Heryanto

Sosok Pak Liek Wilardjo yang paling menonjol dan mengesankan bagi saya adalah kerja-keras, integritas dan kejujurannya. Beliau seorang yang hemat bicara, dan bila sedang bertutur yang tampil bukan saja kesantunan, tetapi juga kehati-hatian dan kecermatan yang luar biasa. Ada satu pengalaman pribadi saya yang tidak akan pernah terlupakan. Pengalaman ini secara jernih menggambarkan secara ringkas kesan mendalam saya tentang seorang tokoh ilmuwan paling cemerlang yang pernah saya kenal dari UKSW.

Di awal tahun 1980an, ketika saya sedang bekerja di belakang meja kantor di UKSW, ada orang yang mengetuk pintu kantor. Setelah saya persilakan masuk, yang tampil adalah Pak Liek. Walau saya persilakan duduk, beliau hanya meninggalkan secarik kertas pendek lalu pamit pergi. Secarik kertas ini ternyata berisi sebuah pesan pendek yang ditulis tangan dengan sangat rapi dan cantik. Isinya tidak penting dan tidak saya ingat lagi. Tetapi yang saya ingat, saya agak bingung karena beliau tidak mau duduk dan mengobrol dengan saya, atau menyatakan langsung pesannya. Sebelum saya sempat bertanya, beliau sudah pergi. Maka saya hanya bisa menerka-nerka. Mungkin beliau tidak menduga saya akan ada di kantor, sehingga merasa perlu menyiapkan pesan tertulis untuk ditinggalkan. Mungkin beliau sedang terburu-buru ke tempat lain. Mungkin juga beliau tidak ingin mengganggu saya karena datang tanpa janji terlebih dahulu.

Tapi kira-kira 10 menit kemudian, pintu kantor saya terketuk lagi. Pak Liek muncul lagi. Saya tambah bingung. Seperti sebelumnya dia hanya datang untuk meninggalkan secarik kertas lagi. Lalu pergi tanpa banyak bicara. Saya buka lipatan kertas itu. Ternyata isinya berupa ralat atas salah ejaan dalam memo sebelumnya.

Perjumpaan awal saya dengan Pak Liek terjadi di pertengahan tahun 1970an. Saya terdaftar sebagai seorang mahasiswa tingkat satu di UKSW dan Pak Liek waktu itu menjabat sebagai Pembantu Rektor I (Akademik). Sebagai seorang mahasiswa di bidang kajian sosial dan budaya, saya tidak pernah secara langsung dan resmi terdaftar sebagai mahasiswa di kelas beliau. Namun, seperti yang dipahami dengan baik oleh semua orang yang pernah bekerja dengannya, lingkup bidang keahlian Pak Liek tidak terbatas secara sempit di satu bidang. Beliau menekuni masalah-masalah kebahasaan dan etika ilmu. Juga berminat dalam bidang musik dan sastra.

Keluasan bidang kerja beliau itulah yang memberikan peluang istimewa bagi saya untuk berkenalan lebih dekat dengan beliau. Bahkan saya sempat bekerja langsung di bawah bimbingan beliau, yakni ketika saya menjadi salah seorang staf pengajar Program Pasca Sarjana, Studi Pembangunan. Itu terjadi sekitar 20 tahun setelah terdaftar sebagai mahasiswa tingkat satu di UKSW. Bila saya tengok kembali ke masa lampau itu, saya tertegun dan merasa bersyukur menjadi sebagian dari generasi yang dilahirkan dan dibesarkan pada masa terjadinya perubahan besar-besaran dalam dinamika Bahasa Indonesia, yang tidak terlepas dari perubahan kemasyarakatan dari tingkat lokal hingga global. Ironisnya, sebagian penting dari masa ini untuk generasi saya merupakan masa kejayaan rezim Orde Baru yang menekankan semboyan politik “stabilitas dan keamanan”, bukan perubahan dan kemajemukan.

Orde Pembangunan

Salah satu bidang yang secara khusus mempertemukan saya dengan Pak Liek secara intelektual adalah bidang kajian bahasa. Selama beberapa tahun dan mungkin hingga saat ini beberapa sahabat dan kolega saya menganggap saya dan Pak Liek berada di dua kutub yang berlawanan dalam gaya berbahasa mau pun pandangan tentang kebijakan negara

dalam bidang kebahasaan. Anggapan itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya. Mungkin ini kesempatan yang baik bagi saya untuk menengok kembali ke belakang dan menguraikan duduk perkaranya secara sepihak menurut wawasan saya, yang mungkin sekali tidak sesuai dengan pemahaman Pak Liek.

Selama lebih dari dua dasawarsa menjadi mahasiswa dan kemudian dosen di UKSW, saya mengenal Pak Liek sebagai salah satu tokoh dalam proyek pemerintah Orde Baru yang biasa dikenal sebagai proyek “Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”. Proyek ini berinduk pada lembaga Pusat Bahasa. Kalau boleh saya rumuskan secara sederhana dan secara sepihak sebagai orang yang “berseberangan” kubu, proyek ini pada intinya ingin merawat dan mencerdaskan mutu berbahasa masyarakat Indonesia menurut wawasan para ahli bahasa dan ilmuwan terkemuka dari berbagai cabang keilmuan yang lain. Mengapa proyek itu mereka kerjakan? Jawabnya bisa panjang-lebar, tetapi berikut ini penjelasan singkat sejauh pemahaman saya.

Pemerintahan Orde Baru (1966–1998 di bawah Jendral Suharto) merupakan kelanjutan pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959–1965 di bawah Insinyur Sukarno) dalam beberapa hal, termasuk gaya pemerintahan otoriterisme. Tapi Orde Baru juga merupakan titik-balik dari pendahulunya dalam satu hal, yakni politik massa. Sebelum 1966 masyarakat diajak berpolitik habis-habisan oleh kaum elit. Masa Orde Baru ditandai oleh penindasan kejam segala bentuk kegiatan dan pemikiran politik di luar politik yang sudah digariskan pemerintah. Dengan kata lain, masa Orde Baru ditandai bukannya oleh “depolitisasi” total seperti yang banyak dikatakan orang, melainkan oleh monopoli berpolitik oleh militer di bawah komando seorang diktator. Sebagai ganti politik-ria ala Demokrasi Terpimpin, Orde Baru memompakan ideologi yang disebut “Pembangunan”. Presiden Suharto diberi gelar Bapak Pembangunan oleh para bawahannya yang diangkat sang Presiden untuk melayani semua kepentingannya. Semua kabinet pemerintahan di masa itu disebut Kabinet Pembangunan. Nyaris tidak ada seminar selama 30 tahun itu yang tidak menyebutkan istilah “pembangunan” dalam rumusan tema.

Tenggelam dalam keasyikan ber-Pembangunan-ria semacam itu, tidaklah terlalu mengherankan bila ada sekelompok ilmuwan Indonesia

yang merasa terpanggil mengabdikan ilmu bagi bangsa dan negara dalam proyek “pembangunan bahasa”. Pembangunan bahasa merupakan kelanjutan logis dari serangkaian tak terbatas dari proses yang di zaman Sukarno di sebut “pembangunan semesta”. Masa panjang pemerintahan Orde Baru ditandai juga oleh maraknya pembangunan kota: pusat pertokoan, jalan layang dan jalan tol, pabrik, bank, rumah sakit, perkantoran dan lembaga pendidikan bertumbuh ibarat jamur di musim hujan. Tentu saja kesempatan untuk “membangun” kota dan industri itu tidak merata. Semakin dekat dengan istana, semakin lebar peluangnya. Begitu juga manfaat yang dihasilkan. Seringkali proses pembangunan itu diawali dengan penggusuran paksa. Juga ditandai oleh penindasan hak buruh, terutama dalam hal berseikat, dan berbagai bentuk praktek korupsi lain diantara pejabat negara dan saudagar. Dalam beberapa hal, gejala yang sama atau mirip terjadi dalam “pembangunan bahasa” walau dalam bentuk yang jauh lebih halus.

Berbagai aspek buruk dari industrialisasi yang dijalankan dengan tangan besi oleh pemerintah Orde Baru disebut “ekses-ekses Pembangunan”. Artinya, berbagai hal buruk itu tidak diakui sebagai akibat langsung, sistemik, dan niscaya dari kebijakan pembangunan yang dipilih dan dikeramatkan pemerintah dan harus diterima mentah-mentah oleh seluruh masyarakat. Hal-hal yang tersebut belakangan ini tidak selalu diperhatikan kaum ilmuwan yang memang dididik dan diharapkan “bersih dari politik” dan hanya menekuni “ilmu”. Kalau ada yang menggugatinya, orang harus sangat berhati-hati mengungkapkannya, karena resiko berat yang harus ditanggung bila pemerintah tersinggung. Para ilmuwan bekerja dalam bingkai keilmuan yang diusahakan se steril mungkin dari unsur politik. Mereka disibukkan oleh berbagai kegiatan akademik yang didukung besar-besaran oleh dana asing, pengalaman belajar dari luar negeri, dan penggunaan peralatan teknologi dari luar negeri. Maka salah satu tantangan langsung dan mendesak bagi para pengelola — juga ilmuwan — berbagai proyek pembangunan pada waktu itu adalah bagaimana merancang, merumuskan, menjelaskan dan melaporkan semua kegiatan mereka itu dalam bahasa Indonesia “yang baik dan benar”.

Persoalannya bukan, atau bukan hanya, masyarakat Indonesia pada waktu itu kurang mahir berbahasa Inggris. Persoalannya juga

defisit identitas dan martabat nasionalisme yang sedang meronta-ronta. Keruntuhan pemerintahan Sukarno dan bangkitnya militerisme Orde Baru berarti awal sebuah proses gencar yang dari segi kebudayaan dapat disebut Amerikanisasi. Perubahan pemerintahan di pertengahan dasawarsa 1960an itu merupakan kemenangan salah satu dari dua kubu yang bertikai habis-habisan di Indonesia, yakni pihak Komunisme dan kaum pendukungnya di satu pihak, serta pihak militer khususnya Angkatan Darat di pihak lain.

Pertikaian tajam di tanah air ini tidak terlepas dari pertikaian serupa di tingkat global dan disebut Perang Dingin, antara blok sosialis dan kapitalis. Sesudah pemerintahan Sukarno yang dianggap condong ke blok sosialis ditumbangkan pembangunan Orde Baru dengan dana, teknologi, bantuan para ahli, dan selera budaya “Amerika” menumbuhkan berbagai cemooh tentang masyarakat yang sok ke-Barat-Barat-an. Padahal di kalangan elit istana sedang marak bangkitnya gaya hidup yang sangat ke-Jawa-Jawa-an. Yang jelas, identitas ke-Indonesia-an dianggap oleh berbagai pihak sedang mengalami krisis. Salah satu obat yang diharapkan bisa mengatasi krisis legitimasi Pembangunan saat itu adalah memompa semangat nasionalisme. Bahasa Indonesia merupakan lahan yang sangat menguntungkan untuk keperluan ini sebab, seperti yang pernah dijelaskan Keith Foulcher, Bahasa Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang paling siap menjadi penguat identitas nasional. Keistimewaan bahasa Indonesia sebagai pewarna identitas nasional bukan warisan leluhur adiluhung. Ini hanyalah warisan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi negara kolonial. Menurut Benedict Anderson, ini merupakan satu-satunya kasus sejarah kolonial di dunia. Semua tanah jajahan besar di bagian dunia lain diatur negara kolonial dengan menggunakan bahasa Eropa.

Perubahan Besar-besaran Berbahasa

Sewaktu masuk UKSW saya terdaftar sebagai seorang mahasiswa untuk program bergelar “sarjana muda” dan kemudian “sarjana penuh” (doktorandus) di bidang pengajaran bahasa Inggris. Seperti banyak dosen dan mahasiswa lain dari jurusan itu, saya juga harus menekuni seluk-beluk bahasa Indonesia dan ilmu linguistik, walau ini ilmu yang

sangat saya benci pada masa itu. Baru 25 tahun kemudian saya merasa bersyukur sedikit-sedikit pernah mempelajari strukturalisme dalam ilmu linguistik di UKSW. Ini saya syukuri ketika saya mempelajari khasanah pasca-strukturalisme dan pasca-modernisme pada akhir dasawarsa 1980an.

Seperti banyak dosen dan mahasiswa lain dari jurusan bahasa Inggris di UKSW, saya terlibat pada program pengajaran intensif bahasa dan budaya Indonesia (PIBBI) untuk orang-orang asing selama bulan Desember dan Januari. Ini memperdalam pemahaman dan sekaligus kecintaan saya pada bahasa Indonesia. Pengalaman ditatar untuk menjadi pengajar PIBBI, khususnya oleh Budiyanto, seorang seniman, wiraswasta dan waktu itu juga dosen di Jurusan Bahasa Inggris, merupakan pengalaman belajar tata-bahasa yang paling mengesankan. Pergulatan saya secara serius dengan pernik-pernik bahasa Indonesia juga menjadi seru. Sejak tahun kedua bermahasiswa saya mulai menerbitkan artikel pendek di media massa komersial nasional.

Semakin lama semakin jelas bagi saya, bahwa saya sungguh beruntung dilahirkan dan dibesarkan pada masa berlangsungnya perubahan besar-besaran dalam sejarah bahasa Indonesia. Pengalaman ini ibarat kesempatan menyaksikan perubahan cahaya langit dari siang menjadi senja lalu malam (atau sebaliknya dari malam lewat subuh menjadi pagi lalu siang). Generasi saya menjadi saksi langsung atas proses peralihan dan perubahan berbagai jenis cahaya dalam sejarah sosial, budaya dan politik Indonesia yang menyertai dan sekaligus dinyatakan dalam bahasa Indonesia.

Sejak Orde Baru berkuasa dan hingga sekitar tahun 1980an sebagian besar publikasi berbahasa Indonesia untuk khalayak umum menggunakan satu ragam bahasa Indonesia, yakni ragam resmi. Berbagai ragam berbahasa yang hidup secara majemuk dalam masyarakat harus tiarap atau minggir ke tepi wilayah pergaulan sosial. Majalah untuk kaum remaja sekali pun seperti *Hai* dan *Gadis* pada masa itu terdorong untuk menggunakan bahasa yang masih patuh pada kaidah resmi “baik dan benar”, walau mereka mencoba tampil secara lebih santai. Apalagi ratusan film Indonesia dan acara televisi. Bahasa dalam media elektronik ini serba kaku. Ada sejumlah ragam bahasa yang mirip dengan apa yang sekarang disebut bahasa gaul. Misalnya prokem dan sejumlah karya sastra

yang diilhami gerakan puisi mbeling dari tahun 1970an. Tetapi jangkauan perluasan bahasa dalam karya-karya seperti ini, juga bahasa prokem, masih sangat terbatas sehingga mudah diabaikan oleh hegemoni ragam baku bahasa Indonesia. Sangat berbeda dengan kedudukan bahasa gaul saat ini, khususnya setelah meledaknya sukses film *Ada Apa Dengan Cinta?* (2002), yang nyaris menjadi kekuatan hegemoni baru dalam dunia hiburan di Indonesia.

Karena ditempa tertubi-tubi bertahun-tahun secara rutin dalam komunikasi sehari-hari, ragam resmi bahasa Indonesia yang kaku itu lama kelamaan bisa dicerna dalam alam pikir dan perasaan orang Indonesia, dan kekakuannya diterima. Ini tidak berarti orang Indonesia menerima secara total ragam bahasa resmi itu dan menyerapnya secara mendarah-daging dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada waktu itu orang bisa menerima ucapan “aku cinta padamu” yang diobral dalam komik dan film. Tetapi mereka sadar ucapan itu nyaris tidak pernah diucapkan di dalam komunikasi sehari-hari di antara kekasih yang sedang mabuk asmara sekalipun. Orang Indonesia bisa memahami bila penutur bahasa Inggris mengucapkan “I love ...” secara wajar dalam kehidupan sehari-hari, entah obyek kalimat itu seorang kekasih, atau tokoh agama, atau musik kesayangan, atau jenis olahraga. Tapi orang Indonesia sadar ucapan itu sulit atau mustahil diterjemahkan kata demi kata ke dalam Bahasa Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk ucapan “terima kasih”. Ucapan ini biasanya tidak digunakan orang Indonesia pada mereka yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya suami-isteri atau sesama anggota keluarga. Antropolog Ward Keeler pernah menyatakan pengamatannya yang sangat tajam. Saya lupa apa persisnya yang dikatakan. Tetapi jika saya ungkapkan kembali berdasarkan ingatan samar-samar dan pengamatan saya sendiri: orang Indonesia hanya mengucapkan terima kasih dalam empat situasi, yakni pada saat berdoa, berpidato, berbicara dengan tamu atau orang asing, dan berbicara dengan nada ironis.

Pada masa itu bila ada orang Indonesia yang mengucapkan “aku cinta padamu”, si penutur mungkin sedang berolok-olok dengan menirukan film dan sengaja memancing gelak tawa orang lain. Atau, bila tidak demikian, ia memang tampil konyol dan lucu tanpa disadari atau disengaja. Hanya dalam satu generasi kemudian hal ini berubah.

Perubahan bahasa seperti itu sangat lumrah untuk bahasa yang hidup dan bergaul di antara bahasa-bahasa lain. Menjadi lazimnya pernyataan "aku cinta kamu" tidak semata-mata merupakan keberhasilan filem dan komik untuk merobohkan tembok yang membatasi dan membedakan bahasa dalam dunia fiksi (komik, drama televisi dan filem) dengan bahasa dalam realitas sehari-hari publiknya. Menurut pengamatan saya, perubahan penting ini sedikit-banyak dijembatani oleh, atau merupakan akibat sampingan dari, slogan yang sebelumnya dikampanyekan pemerintah agar kita "cinta produk Indonesia", ketika pasar industri dikuasai oleh komoditas asing. Slogan pemerintah itu sendiri tentunya tidak diilhami oleh pengertian "cinta" dari filem atau komik yang sudah beredar meluas, tetapi oleh semboyan serupa dalam berbagai bentuk, untuk berbagai tujuan, yang digunakan masyarakat berbahasa Inggris dengan istilah "love".

Sementara ada hegemoni bahasa Indonesia resmi — yang diasuh Pusat Bahasa — kaum dewasa dan terdidik paling tidak di Jawa (mungkin banyak pulau lain) pada masa itu menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama di rumah. Mungkin mereka ini generasi terakhir kaum dewasa dan terdidik di kota-kota yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa Indonesia dipelajari di sekolah, dan dipakai sebagai bahasa resmi, sopan-santun, sebagai bahasa profesional. Di UKSW sendiri, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi, bahasa perkuliahan dan ujian. Tetapi pada saat perkuliahan berakhir, para mahasiswa Jawa mulai berbahasa Jawa, kecuali jika sedang berbicara dengan rekan sekuliah dari luar Jawa yang tidak paham bahasa Jawa.

Baru pada generasi berikutnya kita saksikan anak-anak Indonesia yang terbiasa berbahasa Indonesia di luar situasi resmi, termasuk ketika bermain-main di luar kelas, melamun, atau marah. Yang mendidik mereka bukan guru bahasa di sekolah tapi acara televisi swasta berbahasa Indonesia "baik dan benar" yang mulai bertumbuh di belahan kedua dasawarsa 1980an. Generasi orangtua mereka hanya berhadapan dengan bahasa Indonesia bila berada di kantor, di sekolah, di gedung bioskop, atau membaca koran. Sebaliknya, anak-anak yang dilahirkan di masa kejayaan Orde Baru menghabiskan banyak waktu di hadapan televisi, menyaksikan aneka siaran khusus untuk anak-anak, dalam ragam baku bahasa Indonesia yang sudah dikemas sesuai anjuran para

ahli Pusat Bahasa. Di kalangan generasi ini Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu, dan dipakai sehari-hari di rumah. Salah seorang ibu-pengasuh mereka sesungguhnya adalah televisi.

Di kalangan satu generasi berikutnya terjadi lagi perubahan penting; bahasa mereka merupakan campur-aduk bahasa gaul kedaerahan (ibukota), bahasa Indonesia resmi, dan bahasa Inggris. Sebagian dari penyebabnya adalah pertumbuhan dan penyebaran besar-besaran akses program televisi asing, internet, filem dan kemudian sms telpon genggam. Sepasang ahli media massa Indonesia Krishna Sen dan David Hill menggambarkan dengan bagus perbedaan generasi ini dengan generasi pendahulunya. Dua atau tiga generasi sebelumnya — termasuk generasi saya — adalah generasi yang paling parah menguasai bahasa asing. Tapi justru karena itulah dapat dijumpai sebagian dari generasi ini yang suka sok dan pamer dengan mengobrol istilah-istilah bahasa Inggris di depan orang lain yang dianggap kurang paham.

Tapi generasi 1990an, seperti kata Sen dan Hill, menggunakan kata-kata Inggris ketika berbicara dalam bahasa Indonesia dengan alasan dan sejarah yang berbeda. Kata-kata bahasa Inggris bertaburan dalam tutur kata mereka bukan karena mereka mau pamer apa-apa. Mereka bisanya memang hanya itu. Mereka hanya mengeluarkan apa yang mereka pikirkan tanpa sadar dalam bahasa gado-gado. Kata-kata Inggris dalam bahasa mereka meluncur begitu saja tanpa diusahakan atau dibendung. Mirip dengan senyum polisi dan Amrozy di depan wartawan asing yang membuat gerah rakyat Australia. Justru seandainya generasi mutakhir Indonesia ini diminta bicara tanpa menggunakan kata-kata Inggris sama sekali, mereka akan gelagapan. Bukan berarti generasi yang sekarang berusia 20an ini mahir berbahasa Inggris. Beberapa di antara mereka memang fasih berbahasa Inggris seperti penutur aslinya, karena pengalaman masa muda mereka hidup di negara berbahasa Inggris atau latar belakang kehidupan keluarga yang kuyup dengan bahasa itu. Secara absolut jumlah mereka mungkin tidak tertandingi oleh generasi Indonesia dari jaman sebelumnya. Tetapi secara nisbi, proporsi jumlah mereka merupakan bagian kecil dari rekan segenerasinya di tanah air sendiri.

Di tahun 1980an di sekitar kawasan Asia Tenggara hanya di Singapura dan Filipina kita jumpai kaum bekas terjajah yang lumayan

fasih berbahasa Inggris. Tapi mereka berbahasa Inggris dengan logat nasional yang medok sehingga sulit dipahami orang lain (termasuk yang dari negeri Inggris) yang belum terbiasa. Maka dikenal istilah *Singlish* untuk bahasa Inggris orang Singapura yang kental logat Mandarinnya. Dan ada istilah *Taglish*, untuk bahasa Inggris orang Filipina yang kuat logat Tagalognya. Pada masa itu di Indonesia tidak ditemukan gejala seperti itu. Sebagian besar dari orang Indonesia tidak fasih berbahasa Inggris. Itu 20 atau 30 tahun lalu. Sekarang di kota-kota besar di Jawa, khususnya di Jakarta, sudah tumbuh apa yang bisa disebut “Engdonesia” di antara generasi yang kecanduan i-pod dan sms ini.

Sebagian terbesar dari generasi yang biasa bicara “Tenkyu ya. Bai-bai” ini sering menggunakan kata-kata Inggris yang terlanjur tersebar dari industri hiburan massal tanpa mahir berbahasa Inggris untuk membahas suatu topik. Kaum terpelajar dari generasi Sukarno-Hatta bukan hanya mahir menguasai satu atau beberapa bahasa Eropa untuk membahas masalah-masalah yang rumit, tetapi mereka juga mahir dalam sedikitnya satu bahasa Nusantara sebagai bahasa ibu. Mantan mahasiswa dan kemudian asisten saya Cindy Husein menggambarkan generasi muda mutakhir kita secara lebih tajam. Menurutinya, anak-anak muda Indonesia generasi MTV dan Facebook ini kesulitan menulis satu alinea atau bicara lima menit dalam bahasa Indonesia yang tersusun rapi dan jelas dan tanpa menggunakan istilah dari bahasa Inggris. Tapi mereka juga tidak mampu menulis satu alinea atau bicara lima menit dalam bahasa Inggris yang tersusun rapi dan jelas. Jika pengamatan ini benar, mudah-mudahan ini hanya masa peralihan yang bersifat sementara.

Terlepas dari soal kemampuan berbahasa, generasi i-Pod ini terhanyut dalam gelombang revolusi teknologi komunikasi digital yang mendorong bertumbuhnya aneka sikap, praktek berbahasa dan semangat yang memberontak, bahkan tidak memperdulikan, kaidah-kaidah bahasa Pembangunan ala Orde Baru.

Hegemoni Bahasa dan Tandingannya

Kembali ke masa kejayaan Orde Baru di tahun 1980an, sejumlah perkembangan baru layak diamati. Seperti telah disinggung di atas, rezim Pembangunan Orde Baru ditandai oleh dua proses kebahasaan yang sangat berbeda dari dalam beberapa hal saling berlawanan. Di satu pihak,

masuknya modal asing (khususnya Amerika dan Jepang) disertai berbagai arus Amerikanisasi dalam bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan gaya hidup menjelaskan gencarnya penyebaran bahasa Inggris. Pada awalnya, saya menduga, banjir istilah asing ini menyebar dalam bentuk iklan, pembahasan di forum akademik, berbagai alat teknologi untuk keperluan dan hiburan sehari-hari, propaganda perwira militer serta slogan kaum teknokrat Orde Baru yang baru pulang sekolah dari Amerika. Di pihak lain, dalam berbagai bentuk, khususnya bentuk pemerintahan dan administrasi negara, sedang dirayakan juga budaya priyayi Jawa.

Bahasa Indonesia — yang berinduk pada Bahasa Melayu — menjadi bulan-bulanan perebutan pengaruh dari dua kekuatan: bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Berbagai istilah baru dipasarkan dari kedua bahasa itu. Beberapa istilah yang sudah ada dalam bahasa Indonesia tetapi dianggap kurang keren, digeser oleh padanannya yang baru dipasarkan dari bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Para ahli yang bekerja untuk proyek Pusat Bahasa terjepit di antara kedua kekuatan besar itu. Tidak terkecuali Pak Liek. Sebagian besar dari mereka merupakan sarjana lulusan Amerika. Cara berpikir dan logika mereka jelas berinduk ke rasionalitas moderen Barat. Tetapi mereka juga bersemangat nasionalis dan menolak membanjirnya istilah-istilah Inggris jika sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau yang masuk secara bebas dan sembarangan dalam berbagai versi tanpa memperdulikan kaidah serapan dalam bahasa Indonesia.

Untuk menahan laju masuknya berbagai istilah asing bersamaan dengan maraknya pemasaran komoditi industri dan barang-barang konsumsi yang dikaitkan dengan moderenitas global (artinya Barat) dan mewah, pernah diusulkan pelarangan digunakannya istilah Inggris dalam dunia bisnis. Semangat anti-asing ini tentu saja cocok dengan semangat fasisme yang membayangi pemerintahan militeristik Orde Baru. Ironisnya sikap anti-asing di kalangan elit politik masa itu menampilkan kemunafikan yang luar biasa. Di satu pihak mereka mengagung-agungkan sebuah tahayul yang disebut warisan budaya pribumi adiluhung (biasanya berarti priyayi Jawa yang dibentuk oleh kolonial Belanda) dan menistakan segala bentuk budaya asing. Di saat yang sama, sambil memeras dan menyiksa kelas bawah bangsa sendiri, mereka bekerja sama dengan pemodal asing, meraup harta negara untuk menyejahterakan keluarga dan kerabatnya sampai 12 keturunan, dan mengumbar nafsu konsumsi

tingkat tinggi barang-barang dari Barat. Mungkin karena kontradiksi seperti itu, usulan melarang penggunaan bahasa Inggris dalam pemasaran komoditas industri dan barang-barang konsumsi tidak pernah berhasil.

Berbagai kerja para ahli dalam proyek Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa disponsori oleh pemerintah yang berwatak militeristik dan sekaligus Jawa priyayi. Tetapi bukan berarti para ahli yang mengabdikan ilmunya mau menjadi kerbau yang dicucuk hidung. Para ahli itu pada umumnya yakin secara teguh pada logika ilmu linguistik moderen, khususnya yang dikenal umum di Amerika Serikat. Pendekatan strukturalis dan formalis dalam kebahasaan memang pendekatan “ilmiah” yang tampak sangat memungkinkan logika ketat dan seakan-akan bersifat universal. Maka serangkaian ketegangan dan benturan nilai dan kepentingan sulit dihindarkan karena sudah menjadi bagian terdalam dari proyek itu sendiri. Cepat atau lambat, proyek “moderenisasi” bahasa Indonesia oleh para ahli ini berbenturan dengan gaya pemerintahan dan praktek kebahasaan para pejabat negara dan perwira militer masa itu. Bahkan bahasa Indonesia Presiden Soeharto (dengan logat Jawa dan Melayu-Jawa yang khas dari generasi akhir kolonial) sering jadi bulan-bulan kritik dan bahan olok-olok.

Sementara itu ada dua perkembangan lain yang secara bersama-sama membentuk wawasan dan kritik saya terhadap bangunan paling mendasar dari seluruh proyek Pusat Bahasa. Yang pertama adalah ditemukannya kembali karya-karya sastra pra-Balai Poestaka, yang ditulis dalam bahasa Melayu pasar oleh warga kolonial dari berbagai suku, khususnya Tionghoa dan Belanda, tetapi juga beberapa warga yang digolongkan pribumi dalam hukum kolonial. Sarjana sastra Indonesia dari Perancis Claudine Salmon mungkin menjadi orang yang paling awal dan secara lengkap menemukan bahan-bahan bersejarah itu. Karya penelitiannya berhasil menjungkir-balikkan secara telak apa yang sudah lebih dari 70 tahun disebut sebagai sejarah kesusasteraan nasional Indonesia, yakni sastra yang disusun menurut selera bahasa dan kepentingan pemerintahan penjajah Belanda. Ratusan karya sastra berbahasa Melayu yang ditemukan Salmon disangkal dalam penyusunan sejarah dan khasanah sejarah sastra nasional yang jumlahnya tidak mencapai 100 judul.

Penyangkalan itu didasarkan pada sejumlah dalih yang sangat lemah. Misalnya, bahasa Melayu yang dipakai dalam karya-karya yang diabaikan

itu tidak sesuai selera bahasa “baik dan benar” menurut para ahli linguistik Belanda dan sastrawan Balai Poestaka. Karya-karya itu juga diabaikan karena dua alasan lain. Sebagian dari karya-karya itu disangkal karena berani menggugat ideologi kolonial dan kewibawaan kaum elit pemerintah kolonial yang terdiri dari pegawai berbagai ras baik Eropa, Asia Timur maupun pribumi. Alasan lain bersifat rasis. Sebagian tidak kecil dari karya sastra yang disangkal itu tidak dianggap sebagai bagian dari sastra Indonesia karena ditulis oleh dan berkisah tentang kelompok minoritas Tionghoa. Peneliti lain, seperti C.W. Watson, menunjukkan bahwa karya-karya yang disebut “bacaan liar” itu (mirip stigma “tidak bersih lingkungan” di masa Orde Baru) bukan saja jumlahnya beberapa kali lipat lebih besar ketimbang khasanah resmi sastra Indonesia yang disahkan pemerintah dan sarjana kolonial mau pun pasca-kolonial, tapi sebagian dari mereka sebenarnya secara struktural menjadi cikal bakal dan sumber ilham penulisan karya sastra Balai Poestaka yang dianggap sebagai awal kesusasteraan Indonesia moderen.

Sayang, buku Salmon itu sulit didapatkan di Indonesia, dan tidak dibahas secara meluas di tanah air. Tidak lama kemudian dua dosen dan peneliti sosiologi sastra Indonesia, yakni Sapardi Djoko Damono serta Jakob Sumardjo, melanjutkan apa yang dirintis oleh Salmon. Jakob Sumardjo menyebar-luaskan penelitiannya lewat banyak artikel di media massa yang terbaca khalayak luas. Perubahan wawasan tentang sejarah sastra, bahasa, dan kebangsaan Indonesia itu diikuti oleh ledakan lain yang tak kalah dahsyatnya, yakni diterbitkannya karya-karya Pramoedya Ananta Toer di awal tahun 1980an setelah “dilepaskan” dari pembuangan di Pulau Buru selama 14 tahun, tanpa melewati proses pengadilan, apalagi pembuktian bersalah.

Dari sekian banyak buku Pramoedya yang diterbitkan pada masa itu, ada dua yang langsung berkait dengan pokok bahasan ini. Yang pertama adalah penerbitan ulang kumpulan tulisan “bacaan liar” berbahasa Melayu yang ditulis oleh orang Belanda, Tionghoa dan pribumi (tiga kategori rasial ciptaan pemerintah kolonial Belanda yang dinormalisasikan Orde Baru). Penerbitan ini menyediakan beberapa contoh otentik cikal bakal bahasa dan sejarah sastra Indonesia, khususnya bagi mereka di Indonesia yang belum pernah tahu atau hanya mendengar ulasan tentangnya dari sumber kedua seperti Claudine Salmon, Sapardi Damono, atau Jakob Sumardjo.

Yang kedua, adalah empat jilid novel Buru karya Pramoedya yang ditulis secara indah dan cemerlang dalam kombinasi bahasa Indonesia mutakhir serta bahasa Melayu pra-Indonesia yang selama ini diabaikan oleh kaum elit Indonesia. Belum pernah saya membaca sebuah tulisan dalam bahasa Indonesia yang menggetarkan batin dan mengubah pemahaman saya tentang Indonesia seperti novel-novel dari Pulau Buru ini. Menurut penulisnya, karya fiksi ini ditulis berdasarkan penelitian 20 tahun sebelumnya. Sebagian dari bahasa yang dipakai dalam novel itu mengingatkan saya akan bahasa orang-orang disekitar tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, yakni orang-orang yang hanya menikmati sekolah rendah atau menengah. Bahasa mereka sangat gesit dan lentur, namun dicemooh sebagai bahasa pasaran dan disisihkan sehingga tidak pernah menjadi bagian dari bahasa perkuliahan di kelas, bahasa dalam upacara agama, apalagi karya sastra. Nasibnya mirip dengan nasib dangdut atau jazz di awal pertumbuhannya.

Semua yang saya sebutkan diatas memberikan pencerahan baru atas apa yang terjadi di Indonesia masa itu: apa yang dimuliakan penguasa (misalnya Pembangunan, stabilitas dan keamanan, serta bahasa yang "baik dan benar"); apa yang dinistakan (misalnya Gerakan Pengacau Keamanan, kaum TAPOL dan sanak keluarganya yang "tidak bersih lingkungan", kaum non-pribumi, Islam fundamentalis, separatisme Aceh, Papua, Timor Timur), serta kemiripan semua itu dengan situasi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir masa penjajahan Belanda. Semua yang saya sebutkan itu cukup menggugah sikap kritis siapa pun — termasuk saya — yang mau dan berminat mengkaji ulang seluruh bangunan logika, ideologi, dan kepentingan politik Orde Baru. Tapi masih ada satu lagi pengalaman pribadi yang ingin saya tambahkan. Pengalaman ini membekali saya untuk mengambil jarak dari proyek Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan menyusun sejumlah kritik terhadapnya sepanjang dasawarsa 1980an.

Kritik dan Resiko Salah-paham

Pada awal dekade 1980an, saya mendapat beasiswa untuk studi program Master di Amerika Serikat. Pengalaman belajar keluar negeri seperti ini merupakan kemewahan untuk sebagian besar generasi saya. Apalagi untuk kami-kami yang tidak berstatus pegawai negeri.

Kemewahan ini bukan hanya dari segi akademik atau pun materi, tetapi juga politik. Kesempatan menjadi mahasiswa Indonesia di luar negeri di zaman Orde Baru yang anti-komunisme merupakan sebuah kesempatan emas untuk mempelajari dua hal yang ditabukan di negeri sendiri. Pertama, ini kesempatan bagus untuk menjelajahi isi perpustakaan di universitas dan mencari kajian di seputar masalah sejarah 1965. Kedua, kesempatan yang sama membuka kesempatan berkenalan dengan beberapa bacaan akademik tentang Marxisme. Karena waktu itu saya penggemar masalah kebudayaan, khususnya sastra dan teater, maka salah satu bagian dari sejarah kelam 1965 yang menarik perhatian saya adalah Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang secara kelembagaan berada di bawah payung Partai Komunis Indonesia). Sedang aspek dari Marxisme yang paling menarik perhatian saya waktu itu adalah teori-teori kebudayaan Neo-Marxisme yang tidak lagi berkuat pada masalah determinisme ekonomi-politik.

Saya merasa sangat beruntung belajar di bawah bimbingan Alton L. Becker, seorang professor di bidang antropologi dan sekaligus linguistik. Dengan kesabaran luar biasa beliau memperkenalkan pada saya karya-karya Raymond Williams, seorang pemikir Neo-Marxis yang mendalami masalah kebudayaan dan bahasa, dan kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam kajian budaya di tahun-tahun berikutnya. Dari situlah saya mendalami masalah-masalah sosial politik kebahasaan, dan merasa tertegun bila menimbang betapa jauh aspek-aspek seperti ini terlepas dalam berbagai pembahasan tentang bahasa di Indonesia. Memang dalam masyarakat Orde Baru pada umumnya aspek politik disembunyikan dan sekaligus dianggap kotor. Jadi, sesungguhnya tidak ada yang perlu diherankan. Tetapi, mengingat besarnya perhatian dan investasi pemerintah pada proyek Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, agak aneh juga jika tidak cukup banyak orang yang mengikuti dan mengawasi proyek itu dari segi politik.

Belakangan saya menjadi sadar aspek ini pun terlewatkan dalam berbagai kajian para seniman dan intelektual yang bergabung dalam Lekra, padahal mereka merupakan lembaga yang paling gigih dan bersemangat mengkaji kaitan teoretis antara kepentingan politik dan seluruh aspek kebudayaan. Sejumlah wawancara yang saya lakukan sejak pertengahan tahun 1980an dengan beberapa mantan tokoh Lekra yang berhasil selamat

dari kejayaan Orde Baru, termasuk Pramoedya Ananta Toer, memperkuat kesimpulan sementara saya bahwa dalam bidang kajian politik bahasa Lekra tidak jauh berbeda dari lawan politiknya, termasuk Pusat Bahasa.

Selama tahun 1980an, saya menulis serangkaian kritik terhadap Pusat Bahasa. Yang menjadi sasaran kritik saya bukan aspek-aspek teknis atau praktis dari pelaksanaan proyek mereka, melainkan dasar bangunan pemikiran yang melandasi proyek itu. Sejauh pengamatan saya, sebagian besar kritik dari orang lain terhadap Pusat Bahasa waktu itu merupakan kritik “linguistik”, misalnya mengenai tata-bahasa terutama pembentukan kata atau kalimat atau makna kata. Kritik yang saya tawarkan lebih “sosiologis” dan “politis”, dan merupakan bagian dari kritik terhadap keseluruhan pemikiran dan praktek “Pembangunan” bukan saja yang dijalankan pemerintahan Orde Baru, tetapi berbagai rezim moderen di belahan dunia lain. Kurang dari 10 tahun kemudian semua itu bertumbuh lebih jauh ketika saya mempelajari pasca-strukturalisme dan pasca-modernisme sebagai mahasiswa untuk gelar doktor di Australia. Yang belakangan ini punya cerita sendiri yang tidak perlu diperpanjang disini supaya dongeng ini tidak melantur terlalu jauh dari tujuan awalnya. Saya ingin kembali ke masa saya berdebat dengan proyek Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Jika disederhanakan, pada intinya kritik saya terhadap Pusat Bahasa didasarkan pada pemahaman bahwa kehidupan berbahasa merupakan sebuah wilayah publik yang tidak sepenuhnya dapat atau perlu diatur oleh negara atau cendekiawan yang diangkat negara untuk menjalankan peran kepolisian dalam urusan berbahasa. Menurut saya, ragam “bahasa yang baik dan benar” (apa pun batasan yang dimaksudkan oleh para ahli Pusat Bahasa) tidak mungkin merupakan sebuah cita-cita unggulan yang dapat atau perlu dicapai seluruh rakyat Indonesia. Ragam itu tidak tersusun semata-mata berdasarkan ilmu pengetahuan dalam bidang linguistik, logika, dan sesuai kaidah kebahasaan secara sistematis, baku, dan rapi. Tidak ada bahasa yang baik/jelek atau benar/salah menurut sebuah kriteria yang obyektif, bebas nilai, dan lepas dari kepentingan kelompok sosial (entah “kelas sosial” atau yang lain). Dalam kerja penelitian saya selanjutnya, saya membangun argumentasi tentang “bahasa” bukan sebagai pranata sosial yang universal, tetapi produk dari sebuah perjalanan sejarah global yang

baru sekitar 100 tahun belakangan dipahami sebagai sesuatu yang universal. Professor (Emeritus) George Grace, mantan pimpinan jurusan studi linguistik dari Universitas Hawaii, membuka satu halaman penuh dan panjang di websitenya untuk memberikan tanggapan atas pandangan yang saya ajukan itu.

Berbahasa merupakan bagian dari kehidupan bergaul. Setiap pergaulan selalu mengandung resiko. Salah satu resiko dari setiap komunikasi, entah itu disusun secara “baik dan benar” atau yang tidak, adalah resiko disalah-pahami. Mungkin saja saya telah memahami secara keliru proyek Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bila ini yang terjadi, saya layak meminta maaf. Tetapi apa yang pernah saya ajukan sebagai kritik terhadap proyek itu juga tidak bebas dari resiko disalah-pahami ketika dibaca orang-orang lain. Sebagian mahasiswa saya sendiri pernah bingung dan mungkin juga kecewa dengan sikap dan kata-kata saya, padahal sebelumnya mereka merasa sejalan dengan pemikiran saya tentang bahasa. Dalam pandangan mereka, saya bersikap mendua atau kontradiktif.

Karena saya mengkritik dasar-dasar pemikiran di balik proyek Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mereka menduga saya menolak secara total ragam resmi dan baku bahasa Indonesia yang dibangun dengan susah-payah oleh Pusat itu. Ketika saya mengajukan dinamika dan kehebatan bahasa Melayu pasar dan bahasa pasar lain sebagai contoh perbandingan sebuah tradisi kebahasaan yang pernah hidup di tanah air ratusan tahun, dan berhak bertumbuh terus tetapi ditindas selama abad 20, rupanya saya diduga sedang mengkampanyekan aneka ragam ini sebagai alternatif unggulan terhadap bahasa yang “baik dan benar”. Dengan kata lain, saya dan para ahli dari Pusat Bahasa diduga sama-sama mengunggulkan satu ragam bahasa, hanya saja ragam yang kami unggulkan berbeda. Akibat kesalah-pahaman semacam ini, sebagian mahasiswa saya kecewa ketika saya menuntut mereka bersikap ketat dalam menggunakan ragam bahasa akademik ketika menulis makalah ilmiah. Di mata mereka saya tidak berbeda dari para ahli dari Pusat Bahasa, atau Pak Lick, yang saya kritik.

Ternyata bukan hanya mahasiswa yang pernah mengikuti kelas saya, dan bisa melupakan kuliah saya setelah lulus, mengalami kesulitan memahami apa yang ingin saya sampaikan. Belum lama ini

saya membaca berita tentang diterbitkannya sebuah buku oleh Kepustakaan Populer Gramedia (Oktober 2008) berjudul *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia, Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan* oleh Jerome Samuel, terjemahan dari disertasinya berbahasa Perancis *Modernisation lexicale et politique terminologique: Le cas de l'Indonésien*. Saya tidak mengenal bahasa Perancis, dan belum berkesempatan membaca terjemahan buku itu dalam bahasa Indonesianya. Tetapi menurut laporan berita yang sempat saya baca, Jerome Samuel mengajukan kritik terhadap saya, seperti yang dinyatakan para mahasiswa saya 20 tahun lalu. Ia mempersoalkan mengapa saya mengkritik proyek Pusat Bahasa dengan menggunakan bahasa yang dianjurkan oleh Pusat Bahasa. Menurut laporan yang sama Jerome Samuel membandingkan strategi kerja saya itu dengan Benedict Anderson yang menggunakan bahasa Melayu “rendahan” dari awal abad 20 untuk melancarkan kritik pada awal abad 21 terhadap Pusat Bahasa.

Tentu saja saya berterima kasih mendapatkan perhatian dan kritik seperti itu, terlepas dari soal setuju atau tidak. Kritik yang saya terima selama ini sedikitnya membuka peluang untuk diskusi lanjutan tentang dua masalah lanjutan. Seringkas mungkin saya akan berusaha memaparkan hal-hal ini sebagai penutup tulisan. Pertama, secara faktual tidak benar jika dikatakan bahwa saya hanya melancarkan kritik terhadap Pusat Bahasa dengan menggunakan satu ragam bahasa, yakni ragam resmi dan baku yang dianjurkan Pusat Bahasa. Lebih dari sekali saya membagikan pandangan saya pada berbagai forum dengan gaya dan ragam bahasa yang berbeda-beda, sesuai dengan publik yang saya ajak berdialog. Kadang-kadang saya menggunakan bahasa Melayu pasar, kadang-kadang saya menggunakan ragam baku dan resmi bahasa Indonesia yang dianjurkan Pusat Bahasa yang saya kritik. Saya tidak yakin, dan saya tidak berharap, akan ada banyak orang berminat mengikuti berbagai tulisan saya dalam berbagai forum tentang hal ini. Tidak mengherankan bila kebanyakan orang hanya mengenal tulisan saya yang dipublikasikan media massa arus utama dalam bahasa resmi dan baku. Alasannya sudah jelas dan tidak perlu diuraikan berpanjang-lebar: setiap ragam bahasa berada dalam hubungan kekuasaan yang tidak sama dan berimbang. Ragam resmi menikmati kekuasaan berlimpah di wilayah publik.

Kedua, layak dipertimbangkan lebih jauh apakah bisa dipastikan

bahwa sebuah kritik terhadap Pusat Bahasa akan lebih jitu jika hanya disampaikan dalam satu ragam bahasa saja dalam satu medium saja. Bila hanya digunakan satu ragam bahasa saja, layak dipertanyakan juga apakah penggunaan ragam bahasa alternatif akan dengan sendirinya lebih jitu dibandingkan dengan penggunaan ragam baku yang sama dengan yang dikritik. Menurut saya tidak ada jawaban yang mutlak dan pasti. Tetapi berdasarkan pengalaman langsung saya secara pribadi dalam kasus kritik terhadap Pusat Bahasa, kritik yang saya ajukan dalam ragam baku bahasa Indonesia tampaknya mencapai hasil yang jauh lebih besar ketimbang yang saya sampaikan dalam ragam bahasa lain dan medium di luar yang arus utama.

Berbagai perlawanan terhadap kekuasaan sering kali berhasil ketika dilancarkan dengan senjata milik pihak yang dilawan. Contohnya banyak, berikut ini cuma beberapa saja. Perlawanan berkali-kali oleh kaum terjajah terhadap kekuasaan penjajah Belanda di Hindia Belanda gagal selama dilancarkan hanya atau terutama dengan modal bambu runcing atau ilmu gaib. Terbukti ampuhnya kekuatan pena, diplomasi dan berbagai pranata budaya moderen Barat yang dipelajari kaum elit terjajah untuk menggugat kolonialisme Barat itu sendiri. Jepang menyaingi kekuatan industri dan moderenitas Barat dengan cara yang sama. Tidak kebetulan jika kekuasaan Gereja yang berselingkuh dengan Negara di abad pertengahan Eropa baru berhasil dilawan secara radikal oleh orang dalam yang fasih bahasa dan seluk-beluk politik Gereja itu sendiri, yakni tokoh Reformisme bernama Martin Luther. Keterbukaan dan kemudian keruntuhan Uni Soviet dipimpin bukan oleh musuh dari luar (misalnya Amerika Serikat), tetapi tokoh reformis dari kalangan elitnya sendiri Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Perlawanan anti-kekerasan Gandhi terhadap Inggris berhasil mematahkan kekuasaan kolonial karena bahasa “anti-kekerasan” itu sendiri dianjurkan dan diajarkan peradaban Eropa. Kapitalisme terbukti tidak atau belum pernah ditaklukkan dengan revolusi proletariat dari kiri mau pun gerakan jihad dari kanan.

Kesalah-pahaman seperti di atas bersifat wajar, mudah dimaklumi dan berkali-kali saya alami. Ketika terlibat dalam perbincangan tentang pasca-moderenisme di Indonesia, saya termasuk di antara mereka yang berpandangan bahwa selalu terbuka kemungkinan bagi makna majemuk (dan mungkin saling bertentangan) untuk setiap realitas atau

ungkapan seseorang. Makna tidak mungkin dibekukan atau dibakukan dalam pergaulan masyarakat yang hidup dan bergerak. Tetapi pandangan seperti ini seringkali disalah-pahami, dan disamakan dengan pandangan relativisme subjektif, yang secara mendasar bertolak-belakang dengan pasca-moderenisme. Banyak yang secara keliru menduga (dan kemudian terlanjur mengutuk) pasca-moderenisme berpandangan bahwa setiap hal bisa berarti apa saja, dan ini tergantung subjektivitas setiap individu. Banyak pihak secara keliru menduga pasca-moderenisme sama dengan anti-moderenisme.

Dari orang bijak di Eropa mau pun Timur, kita belajar tentang hukum dialektika dalam setiap unsur kehidupan. Apa yang tampaknya saling bertolak-belakang, sesungguhnya saling membutuhkan untuk kelangsungan eksistensinya. Apa yang kelihatannya utuh sebenarnya terdiri dari atau mengandung unsur-unsur yang saling bertolak belakang dan bisa menjadi benih untuk kehancurannya.

Di sejumlah forum diskusi ilmiah dan dalam sejumlah publikasi makalah di tahun 1980-1990an saya sering tampil berseberangan dengan apa yang dikerjakan Pak Liek di bidang bahasa. Tetapi sesungguhnya selalu ada unsur "Liek Wilardjo" mini dalam setiap usaha saya dalam bidang akademik, juga ketika saya tampil berseberangan dengan pandangan beliau. Unsur itu tidak pernah tumbuh besar dalam usaha keilmuan saya karena situasi tidak mendorong perlunya hal itu. Tetapi unsur itu juga tidak pernah sepenuhnya lenyap. Saya bersyukur dengan adanya unsur ini, walau tidak selalu menyatakannya secara lantang dalam publikasi.

